

PERTIMBANGAN MORAL MENURUT GENDER PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMA KORPRI BANJARMASIN

Sarbaini

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat
sarbaini@unlam.ac.id

ABSTRAK

Dalam perspektif PKN, pembelajaran yang memberikan kasus “dilema moral” akan menjadi wahana pendidikan yang memfasilitasi peserta didik untuk memberikan argumen moral sekaligus menunjukkan posisi perkembangan moralnya terhadap kasus “dilema moral” yang diajukan kepadanya, sehingga lambat laun mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban. Peserta didik kelas XII SMA Korpri Banjarmasin, secara keseluruhan berdasarkan rerata *‘judgment score’* sebesar 14,7, maka tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas berada pada tahapan II (konvensional), yang berorientasi pada hukum dan ketertiban, yakni 70% peserta didik lelaki dengan rata-rata *“judgment score”* sebesar 13,6, dan 100% peserta didik perempuan dengan *“judgment score”* sebesar 15,8. Perbedaan gender pada pengukuran Kohlberg menampakkan hasil-hasil bermakna ganda, memperlihatkan pola-pola yang amat berbeda dari jenis kelamin, tetapi juga kontroversial, namun ditegaskan bahwa perempuan memang berkembang secara berbeda dari laki-laki, juga dalam hal berpikir moral.

Kata-kata kunci: pertimbangan moral, gender, peserta didik, PKN

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia memiliki akar, fungsi dan tujuan sebagai dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 1 ayat 2; pasal 3 UU SPN Tahun 2003).

Paparan akar, fungsi dan tujuan dari Pendidikan Nasional mengindikasikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan melalui mata

pelajaran hendaknya berakar, berfungsi dan bertujuan dimensi-dimensi moral, nilai, karakter dan akhlak mulia. Dua mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan dimensi tersebut adalah mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Dimensi moral, nilai dan karakter dalam pembelajaran PKN menjadi muatan esensial untuk membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizen character*). Bahkan Gates (2006) mempertanyakan, di mana moral dalam PKN. Hubungan-hubungan timbal balik dan peran-peran untuk mendidik karakter (pendidikan karakter, pendidikan moral) dan mendidik untuk kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan) telah digali sebagian besar dalam kondisi di Amerika Utara. Hal ini telah dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membawa formasi karakter dan moral (Althof dan Berkowitz, 2006). Sementara Darling (2008, dalam James Arthur and Ian Davies Ed, 2008) mengajukan premis bahwa PKN, kadangkala

mengacu kepada pendidikan politik, yang merupakan bentuk pendidikan moral dengan seperangkat tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah tujuan untuk belajar hidup bersama dengan orang lain.

Sekaitan dengan itu, dalam menghadapi konflik kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai, maka dibutuhkan kemampuan memberikan argumen moral. Kemampuan memberikan argumen moral ditentukan oleh perkembangan moral. Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral berhubungan dengan tingkatan-tingkatan kebiasaan moral dengan teman-teman sebaya, perkembangan kognitif dan konflik. Bandura menegaskan bahwa perkembangan moral merupakan pemahaman terbaik melalui konteks dari faktor-faktor situasi sosial, pertimbangan dan kognitif yang menyinggung terhadap kontrol-diri dan persepsi diri dalam tataran sosial. Gilligan (Berk, 1999), menunjukkan bahwa “penelitian terhadap perkembangan moral dibatasi oleh amat banyak perhatian terhadap hak-hak dan keadilan (menurut pandangan ‘maskulin’) dan amat kecil perhatian terhadap kepedulian dan kepekaan (menurut pandangan ‘feminis’) dan feminis cenderung kepada ‘menekankan kepedulian dan menempatkan perspektif empati, sementara tiap laki-laki menekankan keadilan atau menggunakan keadilan dan kepedulian yang sama. Pendekatan ini memberikan empati bahwa kehidupan nyata merupakan arena perkembangan moral yang muncul dan berbeda-beda dalam persepsi seluruh kelompok jender. Killen dan Nucci (1995) percaya bahwa tipe dari interaksi dalam kelompok teman sebaya dapat secara positif mempengaruhi perkembangan moral.

Dalam menghadapi masalah moral yang terjadi di masyarakat, maka kebiasaan konvensional yang berlaku di masyarakat, terutama orang tua demikian juga guru di sekolah adalah dengan memberikan contoh atau nasehat tentang moral yang baik dan moral yang buruk, maupun dengan cara memberikan ganjaran, jika moral yang baik dipatuhi, dan menghukum, kalau moral yang buruk dilanggar. Namun demikian menurut studi Hartshorne dan May (dalam Duska dan Whelan, 1982: 15-16), bahwa dalam pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral, maka prinsip-prinsip yang diajarkan dengan cara memberi contoh, menasehati, memberi hadiah dan memberi hukuman

adalah tidak efektif untuk menghasilkan tingkah laku moral yang dikehendaki. Dengan kata lain, metode konvensional dalam pendidikan moral/budi pekerti warga negara (*civics virtue*) tidak memadai lagi, maka diperlukan suplemen metode lain yang lebih efektif. Salah satunya adalah model pembelajaran kognitif moral yang menyajikan kasus “dilema moral” dalam materi pelajaran, yang mampu memfasilitasi penumbuhkembangan perkembangan moral peserta didik.

Dalam perspektif PKn, pembelajaran yang memberikan kasus “dilema moral” akan menjadi wahana pendidikan yang memfasilitasi peserta didik untuk memberikan argumen moral sekaligus menunjukkan posisi perkembangan moralnya terhadap kasus “dilema moral” yang diajukan kepadanya, sehingga lambat laun mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban (Winataputra, 2006). Namun demikian sampai saat ini belum terlalu banyak penelitian tentang perkembangan moral perspektif moral warga negara dalam pembelajaran PKn. Oleh karena itu kondisi perkembangan moral peserta didik dalam pembelajaran PKn layak untuk diteliti, dieksplorasi dan diidentifikasi, demi kepentingan membangun eksistensi PKn dari dimensi moral, nilai, dan karakter, khususnya gambaran tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas XII dilihat dari gender di SMA KORPRI Banjarmasin.

1. Moral, Moralitas dan Urgensinya untuk PKn

Moral didefinisikan sebagai tingkah laku yang benar, tidak hanya dalam relasi-relasi sosial dekat kita, tetapi juga hubungan-hubungan kita dengan anggota warga-warga negara kita dan dengan seluruh ras manusia (Oladipo, 2009). Sementara moralitas menurut Haydon (1999) adalah sistem dari batasan-batasan terhadap perilaku orang, yang memenuhi fungsi-fungsi sosial untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain. Sekaitan dengan itu, Haydon (1999) mengemukakan PKn sebaiknya menempatkan moralitas secara jelas sebagai suatu topik, dan karena moralitas adalah pandangan-pandangan berkompetisi – bahwa moralitas adalah

persoalan dari pilihan pribadi, yang Tuhan berikan, moralitas juga adalah konvensi sosial, dan karena itu, moralitas harus didiskusikan. Bok (2006) mencatat, meskipun saran-saran akan etika terapan sudah biasa, etika terapan jarang diwajibkan. Sebagai hasil, mayoritas dari peserta didik lulusan sekolah tanpa menerima pelajaran dalam penalaran moral atau dalam mata pelajaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan mereka sebagai warga negara yang banyak mengetahui dalam demokrasi.

2. Perkembangan (Penalaran/Pertimbangan) Moral menurut Kohlberg

Isu tentang bagaimana orang mengembangkan pengetahuan dan pertimbangan moral masih merupakan hal yang penting dari literatur psikologi baik teoritis maupun empiris (Manavipour, 2012). Perkembangan moral berkaitan dengan pertumbuhan dari pada seluruh pemikiran, nilai dan emosi yang berpengaruh kuat terhadap perilaku dalam situasi-situasi etis (Eisenberg, et al, 2009, dalam Manavipour, 2012). Salah satunya komponen-komponen kognitif dari teori tahapan seperti Piaget dan Kohlberg yang juga dibicarakan secara menonjol sekali dalam literatur perkembangan moral (Lapsley, 2006, dalam Manavipour, 2012). Teori yang secara lebih khusus membahas perkembangan penalaran dan perkembangan moral adalah Teori Kohlberg tentang penalaran dan perkembangan moral (1999, dalam Dellaportas, Cooper, Leung, 2006), berpusat pada bagaimana sistem keyakinan seseorang mengarahkan resolusi dan memecahkan masalah konflik dalam kehidupan sehari-hari. Teori Kohlberg mengusulkan bahwa individu-individu mempunyai keterampilan-ketrampilan kognitif yang mampu mengidentifikasi, dan digunakan untuk memecahkan dilema-dilema etis. Keterampilan-keterampilan itu, ditentukan oleh alasan-alasan yang diberikan tentang bagaimana tindakan-tindakan tertentu yang dirasa hanya secara moral atau lebih disukai. Alasan-alasan yang digunakan oleh Kohlberg

untuk memberikan kontinum hierarkis yang terdiri dari 6 tahapan perkembangan moral. Tahapan tersebut secara berturut-turut mewakili tingkat lebih tinggi dari penalaran tentang definisi dan bentuk dari benar dan salah. Dasar rasional yang digunakan para individu untuk memecahkan dilema-dilema moral, memperlihatkan karakteristik-karakteristik yang memungkinkan peneliti mengklasifikasi orang sesuai dengan tahapan tertentu dari perkembangan moral (Weber, 1990, dalam Dellaportas, Cooper, Leung, 2006). Dalam studi Kohlberg, para subyek ditanya terutama, apakah yang mereka pikirkan tentang tokoh utama dalam cerita, yang akan dilakukan dan mengapa, misalnya, suatu dilema yang berjudul "Heinz dan Obat", yang melibatkan seseorang bernama Heinz dan istrinya sakit sekarat karena kanker.

3. Tahapan Perkembangan Moral Kohlberg

Kohlberg menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki dan menghaluskan teori perkembangan moralnya seperti metode-metode pentahapannya. Kohlberg kemudian mendalilkan enam tahapan teorinya ke dalam tiga kelompok tingkatan; prekonvensional, konvensional dan postkonvensional (Kohlberg, 1984, dalam Rudd, Mullane, Stoll, 2010). Pada tahapan prekonvensional, keputusan-keputusan moral dibuat dari perspektif egosentris. Apa yang benar didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan, karena menghindari hukuman (Tahapan 1) atau dengan mempertimbangkan pentingnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang lain, jadi kebutuhan yang dimiliki seseorang dapat dipenuhinya (Tahap 2). Penalaran individu-individu pada tingkat konvensional digerakkan melintasi kepentingan-kepentingan yang dimiliki diri sendiri dan lebih menaruh perhatian terhadap keanggotaan mereka dalam suatu kelompok atau masyarakat yang lebih luas (Tahap 3), bagi mereka, apa yang benar adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan harapan-harapan dari orang-orang lain (misalnya, teman-teman, anggota-anggota

keluarga, dan otoritas dari orang). Pembuatan keputusan moral berdasarkan pada kewajiban seseorang untuk menegakkan hukum dan berkontribusi terhadap kehendak baik dari masyarakat (Tahap 4). Sementara penalaran-penalaran pada tahapan postkonvensional, tidak hanya melakukan untuk keanggotaan mereka pada masyarakat, tetapi juga lebih penting, keyakinan setiap individu mesti melakukannya karena prinsip moral (Tahap 5), jadi penalaran yang dilakukan pada tahap ini adalah didasarkan kepada pendirian seseorang terhadap kewajiban untuk menegakkan 'contract' (perjanjian) dengan masyarakat. Sedangkan pada tahap 6, tahapan tertinggi, apa yang benar adalah didasarkan pada prinsip-prinsip moral, bahkan jika itu bermakna melanggar hukum-hukum tertentu. Pada tahap 6 ini, Kohlberg mengemukakan bahwa prinsip moral dari keadilan adalah inti dari pembuatan keputusan moral.

Namun demikian, meskipun besar pengaruh dari penelitian Kohlberg (1981, 1984, dalam dalam Rudd, Mullane, Stoll, 2010), teori pertimbangan moral dan metodologi asesmennya, tidak ada yang tidak mengritisinya. Beberapa di antaranya berkaitan dengan; a) bias gender laki-laki dalam menyatakan apakah tingkat-tingkat lebih tinggi dari pertimbangan moral (Gilligan, 1982), b) pemaknaan dan keberadaan 6 tahapan perkembangan (Gibbs, 2003), c) konsistensi tahapan, misalnya; penggunaan tahap perkembangan moral yang sama tanpa menghiraukan situasi (Locke, 1979; Rest, 1979), d) invarians dari perurutan tahap (Locke, 1979; Rest, 1979), e) penggunaan dari asesmen berbasis produksi verbal (Rest, 1979), f) universalitas kultural (Boyes dan Walker, 1988; Locke, 1979), dan g) pandangan amat terbatas pada pertimbangan moral (misalnya, pertimbangan moral yang utama berkaitan dengan prinsip moral dari keadilan (Walker et al., 1995).

B. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA Korpri Banjarmasin, sementara sampel adalah peserta didik kelas

XII, dan penunjukkan responden dilakukan dengan teknik proportional random sampling, sehingga diperoleh 20 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes moral yang diberikan kepada responden berupa sebuah cerita yang mengandung "dilema moral Heinz dan Obat" dan terkait dengan materi pelajaran PKn. Pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan cerita "dilema moral" bersifat "probing" yang dapat menumbuhkan proses kognitif dan empati. Selanjutnya terhadap setiap jawaban responden dirumuskan untuk dijadikan standar dan dikategorikan ke dalam tingkatan perkembangan moral kognitif Kohlberg. Teknik analisis data didasarkan pada rumusan kualitas jawaban yang terbagi dalam tiga kategori, jawaban untuk 'probing question' (PQ), jawaban untuk proses kognitif (PK), dan jawaban yang menyangkut empati (Em). Bobot penilaian jawaban adalah diberi nilai 100% dengan perbandingan bobot (PQ:PK:Em=16:42:42). Bobot ini hanya berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan pengolahan dan penafsiran, dengan alasan PQ, 16, karena hanya akan menghasilkan pencapaiannya saja, tidak diperlukan dalam pengolahan data. Dengan kata, apakah peserta didik itu jawabannya positif atau negatif, sedangkan untuk PK dan Em, bobotnya sama-sama 42, karena pada hakekatnya PK dan Em mempunyai nilai yang sama, juga didasarkan teori perkembangan moral Piaget dan, mempermudah pengolahan, karena sesuai dengan tingkat perkembangan moral Kohlberg yang terdiri dari 6 tingkatan, maka setiap tingkat diberi bobot naik dua rentangan, yaitu 2,4,6,8,10,12, sehingga jumlahnya 42. Jawaban setiap peserta didik dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan bobotnya, yang disesuaikan dengan kunci jawaban setiap tingkat perkembangan moral. Untuk menentukan tingkat perkembangan moral seorang peserta didik dilakukan dengan cara menjumlahkan PK dan Em (Judgment Score), dengan menggunakan skala interval, sebagai berikut :

TINGKATAN	TAHAPAN	SKOR
III	6	21 – 24
	5	17 – 20
II	4	13 – 16
	3	9 – 12

I	2	5 - 8
	1	0 - 4

C. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Perkembangan Moral Kognitif
Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri
Berdasarkan Gender

Tabel 1
Tingkat Perkembangan Moral Kognitif
Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri
Berdasarkan Gender

No	Gender	Jawaban			Skor	Tingkat perkembangan Moral Kognitif
		PQ	P K	Em		
1	P	+	8	8	16	4
2	L	+	6	6	12	3
3	P	+	8	6	14	4
4	L	+	4	6	10	3
5	P	+	8	8	16	4
6	L	+	4	6	10	3
7	P	+	8	8	16	4
8	L	+	8	8	16	4
9	P	+	8	6	14	4
10	L	+	8	8	16	4
11	P	+	8	8	16	4
12	L	+	4	8	12	3
13	P	+	8	8	16	4
14	L	+	8	8	16	4
15	P	+	8	8	16	4
16	L	+	8	8	16	4
17	P	+	8	8	16	4
18	L	+	8	8	16	4
19	P	+	8	8	16	4
20	L	+	4	6	10	3

21	P	+	8	8	16	4
22	L	+	6	8	14	4
23	P	+	8	8	16	4
24	L	+	6	8	14	4
25	P	+	8	8	16	4
26	L	+	6	6	12	3
27	P	+	8	8	16	4
28	L	+	8	6	14	4
29	P	+	8	8	18	4
30	L	+	6	8	14	4
31	P	+	8	8	16	4
32	L	+	6	8	14	4
33	P	+	8	8	16	4
34	L	+	8	6	14	4
35	P	+	8	8	16	4
36	L	+	6	8	14	4
37	P	+	8	8	16	4
38	L	+	8	6	14	4
39	P	+	8	8	16	4
40	L	+	6	8	14	4
		J U M L A H			$\Sigma 588$	
					Rat a2 =1 4,7	4

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan moral kognitif dari peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari gender secara keseluruhan, sebagian besar

(75%) berada tingkatan II, yakni tingkat konvensional, pada tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban). Sementara sebagian kecilnya (15%) berada di tingkat II juga, yakni pada tingkat konvensional, namun berbeda tahapannya, yaitu pada tahapan 3, perkembangan moral kognitif yang berorientasi pada konformitas terhadap citra stereotipe mayoritas (orientasinya masuk kelompok “*godboy*” atau “*nicegirls*”). Namun dilihat secara rata-rata secara keseluruhan “*judgment score*” sebesar 14,7, maka tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas XII SMA Korpri berada pada tahapan II (konvensional), yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)

1. Tingkat Perkembangan Moral Kognitif Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri Berdasarkan Gender Lelaki

Tabel 2
Tingkat Perkembangan Moral Kognitif Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri Berdasarkan Gender Gender Lelaki

No	Gender	Jawaban			Skor	Tingkat perkembangan Moral Kognitif
		PQ	PK	Em		
2	L	+	6	6	12	3
4	L	+	4	6	10	3
6	L	+	4	6	10	3
8	L	+	8	8	16	4
10	L	+	8	8	16	4
12	L	+	4	8	12	3
14	L	+	8	8	16	4
16	L	+	8	8	16	4
18	L	+	8	8	16	4
20	L	+	4	6	10	3
22	L	+	6	8	14	4

2						
24	L	+	6	8	14	4
26	L	+	6	6	12	3
28	L	+	8	6	14	4
30	L	+	6	8	14	4
32	L	+	6	8	14	4
34	L	+	8	6	14	4
36	L	+	6	8	14	4
38	L	+	8	6	14	4
40	L	+	6	8	14	4
	J U M L A H				Σ272	
					Rata2=13,6	4

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan moral kognitif dari peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari jenis kelamin lelaki secara keseluruhan, sebagian besar (70%) berada tingkatan II, yakni tingkat konvensional, pada tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban). Sementara sebagian kecilnya (30%) berada di tingkat II juga, yakni pada tingkat konvensional, namun berbeda tahapannya, yaitu pada tahapan 3, perkembangan moral kognitif yang berorientasi pada konformitas terhadap citra stereotipe mayoritas (orientasinya masuk kelompok “*godboy*” atau “*nicegirls*”). Namun dilihat secara rata-rata secara keseluruhan “*judgment score*” yang diperoleh sebesar 13,6, maka tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas XII SMA Korpri berada pada tingkat II (konvensional), yaitu tahapan 4, berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)

1. Tingkat Perkembangan Moral Kognitif Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri

Berdasarkan Gender Perempuan

Tabel 3
Tingkat Perkembangan Moral Kognitif
Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri
Berdasarkan Gender Perempuan

No	Gender	Jawaban			Skor	Tingkat perkembangan Moral Kognitif
		PQ	PK	Em		
1	P	+	8	8	16	4
3	P	+	8	6	14	4
5	P	+	8	8	16	4
7	P	+	8	8	16	4
9	P	+	8	6	14	4
11	P	+	8	8	16	4
13	P	+	8	8	16	4
15	P	+	8	8	16	4
17	P	+	8	8	16	4
19	P	+	8	8	16	4
21	P	+	8	8	16	4
23	P	+	8	8	16	4
25	P	+	8	8	16	4
27	P	+	8	8	16	4
29	P	+	8	8	18	4
31	P	+	8	8	16	4
33	P	+	8	8	16	4
35	P	+	8	8	16	4
37	P	+	8	8	16	4
39	P	+	8	8	16	4
	JUM				Σ316	

	L					
	A					
	H					
					Rata2 =15,8	4

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan moral kognitif dari peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari jenis kelamin perempuan, seluruhnya (100%) dan "*judgment score*" sebesar 15,8, maka dapat dikatakan berada pada tingkatan II, yakni tingkat konvensional, dengan tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban.)

Hasil penelitian menunjukkan temuan-temuan bahwa

1. Berdasarkan rata-rata secara keseluruhan "*judgment score*" sebesar 14,7, maka tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas XII SMA Korpri berada pada tahapan II (konvensional), yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)
2. Dari jenis kelamin lelaki secara keseluruhan, sebagian besar (70%), rata-rata secara keseluruhan "*judgment score*" yang diperoleh sebesar 13,6, tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas XII SMA Korpri berada pada tingkat II (konvensional), yaitu tahapan 4, berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)
3. Dari jenis kelamin perempuan, seluruhnya (100%) dan "*judgment score*" sebesar 15,8, maka dapat dikatakan berada pada tingkatan II, yakni tingkat konvensional, dengan tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta didik kelas XII SMA Korpri lebih banyak berada pada tingkat II (konvensional) di tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama, atau berorientasi pada hukum dan ketertiban. Namun peserta didik perempuan menunjukkan jumlah yang lebih banyak dan "*judgment score*" lebih tinggi dari

peserta didik laki-laki. Temuan ini bisa jadi merupakan ulangan dari temuan-temuan tentang perkembangan moral dari perspektif gender. Karena temuan ini merupakan kebalikan dari arus besar teori Kohlberg tentang perkembangan moral, seperti beberapa penelitian yang memperlihatkan dengan jelas perbedaan jenis kelamin, di mana lebih rendahnya skor kaum perempuan dibanding kaum laki-laki pada tahapan Kohlberg (Donenberg dan Hoffman, 1988), atau beberapa penelitian menunjukkan bahwa para anak perempuan tidak berkembang secepat laki-laki (Held, 1993). Hal demikian dianggap bias secara jenis kelamin, karena mendukung kaum lelaki (Baumrin, 1986; Bussey & Maugham, 1982; Gilligan, 1977, 1982; Haan, Smith, & Block, 1968; Holstein, 1976; Kohlberg & Kramer, 1969, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988), meskipun ada beberapa yang meragukannya, karena semua sampelnya laki-laki (Brabeck, 1983; Bussey & Maugham, 1982; Garwood, Levine, & Ewing, 1980; Gilligan, 1982, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988) atau tokoh utama di masing-masing dilema adalah laki-laki (Donenberg dan Hoffman, 1988). Oleh karena itu, banyak penyelidik kalangan anak perempuan menemukan skor yang lebih rendah dari anak lelaki pada skala Kohlberg (Baumrind, 1986; Bussey & Maugham, 1982; Ford & Lowery, 1986; Gibbs, Arnold, & Burkhart, 1984; Haan et.al, 1968; Holstein, 1976; Kohlberg & Kramer, 1968, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988). Bussey & Maugham (1982, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988) menghubungkan disparitas dengan bentuk Tahap ketiga dan keempat, di mana Tahap ketiga karakteristik-karakteristik “feminin” secara tradisional dari pernyataan perasaan (ekspresif) dan kebutuhan untuk melakukan yang baik untuk memperoleh persetujuan, dan Tahap keempat mengakomodasi peran khas “maskulin” terhadap hukum dan peraturan.

Temuan penelitian juga memperkuat penelitian-penelitian yang mengemukakan tidak ada bias dalam skala Kohlberg (Brabeck, 1983; Gibbs et.al., 1984; Hoffman, 1975; Kerber, Greeno, Maccoby, Luria, & Stack, 1986; Maccoby & Jacklin, 1974; Rest, 1979; 1983; Thomas, 1986; Walker, 1984, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988)), yakni bisa jadi bahwa kaum

perempuan bahkan lebih tinggi skornya dari kaum laki-laki (Garwood et.al., 1980; Rest, 1979; Thomas, 1986, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988).

Perbedaan gender pada pengukuran Kohlberg menampakkan hasil-hasil bermakna ganda. Tambahan, konsep-konsep yang lain dari moralitas memperlihatkan pola-pola yang amat berbeda dari jenis kelamin, tetapi juga kontroversial (Donenberg dan Hoffman, 1988). Gilligan (1982, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988) menegaskan bahwa perempuan memang berkembang secara berbeda dari laki-laki, juga dalam hal berpikir moral (Gilligan, 1988, dalam Galotti, 1989) dan selama kategori-kategori itu melalui mana perkembangan diukur adalah diperoleh dari penelitian laki-laki, perbedaan dari standar maskulin tak bisa diacuhkan akan dilihat sebagai kegagalan dari perkembangan.

Brabeck (1983, dalam Donenberg and Lois W. Hoffman, 1988) membandingkan teori-teori Gilligan perspektif perempuan dan Kohlberg perspektif laki-laki tentang perkembangan moral berdasarkan sudut pandang masing-masing. Untuk Gilligan, moralitas tumbuh dari konflik tanggungjawab-tanggungjawab atas perempuan, daripada persaingan hak-hak sebagai dilakukan oleh laki-laki, dan moralitas tanggungjawab berdasarkan harmoni dan tanpa kekerasan, sementara Kohlberg didasarkan pada kewajaran dan timbal balik. Gilligan membedakan isu-isu dari kasih sayang, pengorbanan diri dan egoisme, dan pertimbangan-pertimbangan dari relasi-relasi, Kohlberg lebih perhatian dengan pemisahan, peraturan-peraturan, legaitas-legalitas, dan pertimbangan-pertimbangan dari individu. Bagi Gilligan, dilema-dilema moral adalah kontekstual dan dipecahkan melalui berpikir induktif, tetapi dalam skema Kohlberg, prinsip-prinsip moral adalah universal dan diterapkan pada dilema-dilema moral melalui berpikir formal dan abstrak. Kohlberg beranggapan orang berkembang melalui tahap-tahap yang universal, rangkaian invarian, dan diatur secara hierarkis, sementara teori tahapan Gilligan diatur secara hierarkis tetapi rangkaiannya tidak invarian dan mencerminkan pertumbuhan perempuan. Brabeck (1983, dalam Donenberg and Lois W. Hoffman, 1988) menyimpulkan bahwa kedua teori itu adalah

penting dan amat bernilai dalam menambah pemahaman terhadap proses pertumbuhan moral orang-orang.

D. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan berdasarkan rerata "judgment score" sebesar 14,7, maka tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik kelas berada pada tahapan II (konvensional), yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)
2. Sebanyak 70% peserta didik lelaki berdasarkan rata-rata "judgment score" sebesar 13,6, tingkat perkembangan moral kognitif peserta didik berada pada tingkat II (konvensional), yaitu tahapan 4, berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)
3. Seluruh peserta didik perempuan dengan "judgment score" sebesar 15,8, berada pada tingkatan II, yakni tingkat konvensional, dengan tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban hukum, sosial dan agama (orientasi pada hukum dan ketertiban)
4. Perbedaan gender pada pengukuran Kohlberg menampilkan hasil-hasil bermakna ganda, memperlihatkan pola-pola yang amat berbeda dari jenis kelamin, tetapi juga kontroversial, namun ditegaskan bahwa perempuan memang berkembang secara berbeda dari laki-laki, juga dalam hal berpikir moral

DAFTAR PUSTAKA

- Althof and Berkowitz. 2006. Moral Education and Character Education: Their Relationship and Roles in Citizenship Education. *Journal of Moral Education*. Volume 35. Issue 4, 2006.
- Arthur, James and Davies, Ian. 2008. *Citizenship Education*. Volume 2; The Purposes of Citizenship Education. Sage Library of Educational Thought and Practice. pp. 74-188.
- Berk, L. 1999. *Infants, Children, and Adolescents* (3rd.ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Beck, C. 1971. *Moral Education in the Schools*. Toronto: OISE.
- Blatt, M. 1969. *The Effects of Classroom Discussion on the Development of Moral Judgment*. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Chicago.
- Blatt, M & Kohlberg, L. 1970. The Effects of Classroom Moral Discussion upon Children's Level of Moral Judgment. *Merrill-Palmer Quarterly*, 1970, 16, 17-22.
- Boyes, M.C., and Walker, L.J., 1988. Implications of Cultural Diversity for the Universality Claims of Kohlberg's Theory of Moral Reasoning. *Human Development*, 31, 44-59.
- Boyd, D. 1976. *Education Toward Principled Moral Judgment: An Analysis of an Experimental Course in Undergraduate Moral Education Applying Lawrence Kohlberg's Theory of Moral Development*. Unpublished Doctoral Dissertation. Harvard University.
- Darling, Linda Farr. 2008. The Essential Moral Dimensions of Citizenship Education: What Should We Teach? *Journal of Educational Thought/Revue de la Pensee Educative*, Vol.36. No.3. pp.229-247. Dec 2002.
- Dellaportas, S., Cooper, B.J., Leung, P. 2006. Measuring Moral Judgement and the Implications of Cooperative Education and Rule-Based Learning. *Accounting & Finance*. Volume. 46, Issue 1, p.53-70. March 2006.
- Donenberg, Geri R., and Hoffman, Lois W. 1988. Gender Differences in Moral Development. *Sex Roles*. Vol.18 No.11/12, Juni 1988. Online. <https://www.researchgate.net/publication/30846344>. Unduh 6 April 2016
- Duska, Ronald dan Whelan, Mariellen. 1982. *Perkembangan Moral*, terj. Dwija Atmaka, Yogyakarta: Kanisius.

- Galotti, Kathleen M. 1989. Gender Differences in Self-Reported Moral Reasoning: A Review and New Evidence. *Journal of Youth and Adolescence*, Vol.18, No.5, 1989
- Gates, Brian.E. 2006. Where is the Moral in Citizenship Education. *Journal of Moral Education* Vol.35, No.4, December 2006, pp.437-441 .
- Gilligan, Carol.1977. In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality. *Harvard Educational Review* Vol.47 No.4. Nopember 1977. Online. [https://facweb.northseattle.edu/karchibal/d/PSYC200/Articles/Gilligan\(1977\)_In%20A%20Different%20Voice.pdf](https://facweb.northseattle.edu/karchibal/d/PSYC200/Articles/Gilligan(1977)_In%20A%20Different%20Voice.pdf). Unduh.16 Februari 2013.
- Gilligan, Carol. 1982. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gibbs, J.C. 2003. Moral Development & Reality: *Beyond the Theories of Kohlberg and Hoffman*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Haan, N., Smith, M. B., & Block, J. (1968). Moral reasoning of young adults: Political-social behavior, family background, and personality correlates. *Journal of Personality and Social Psychology*, 10, 183-201.
- Haydon. Graham. 1999. The Moral Agenda of Citizenship Education. *The School Field*, Volume X, Number 34. Online. www.see-educoop.net/pdf. Unduh. 24 Januari 2016
- Hartshorne dan May, dalam Duska, Ronald dan Whelan, Mariellen. 1982. *Perkembangan Moral*, terj. DwijaAtmaka, Yogyakarta: Kanisius.
- Held, Virginia. (1993). *Feminist Morality. Tranforming Culture, Society, and Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Holstein CB (1976) Irreversible, stepwise sequence in the development of moral judgment: a longitudinal study of males and females. *Child Development* 47:51-61.
- Killen dan Nucci.1995. Morality, Authonomy, and Social Conflict. In M.Killen & D.Hart (Eds.), *Morality in Everydaylife: Developmental Perspectives*. (pp.52-86). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kohlberg, L. 1981. *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development* (Vol.1). San Francisco: Harper & Row, Publishers.
- Kohlberg, L.1984. *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development* (Vol.2). San Francisco: Harper & Row, Publishers
- Locke, D.1979. Cognitive Stages or Developmental Phases? A Critique of Kohlberg's Stage-Structural Theory of Moral Reasoning. *Journal of Moral Education*, 8, 168-181.
- Manavipour, Davood.2012. Iranian Students' Moral Development Scale. *Educational Research and Essay*. Vol.1(2), pp.15-20, April 2012. Online.<http://www.wudpeckerresearchjournals.org/ERE/2012>. Unduh. 24 Januari 2016.
- Oladipo, S.E. 2009. Moral Educcation of the Child: Whose Responsibility?. *Journal Social Science*, 20 (2):149-156 (2009).
- Rest, J.R.1979. *Development in Judging Moral Issues*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Rudd, Andrew., Mullane, Susan., Stoll, Sharon., 2010. Development of an Instrumen to Measure the Moral Judgments of Sport Managers. *Journal of Sport Management*, 2010,24, 59-83.

- Winataputra, Udin.2006. *Konsep dan Strategi PKn di Sekolah; Tinjauan Psiko-Pedagogis*. Makalah. Disampaikan pada tanggal 8 Juni 2006 di Auditorium Depdikbud Senayan Jakarta.
- Walker, L.J., Pitts, R.C., Hennig, K.H., & Matsuba, M.K.1995. Reasoning about Morality and Real-life Moral Problems, In M.Killen & D.Hart (Eds.), *Morality in Everyday life: Developmental Perspectives* (pp.371-407). Cambridge, England: Cambridge